

IDENTIFIKASI POTENSI TRANSMIGRAN BERDASARKAN KARAKTERISTIK MIGRAN DI INDONESIA

IDENTIFICATION OF TRANSMIGRANT POTENCY BASED ON MIGRANT CHARACTERISTICS IN INDONESIA

Sonny Harry B Harmadi dan Endang Antarwati

Lembaga Demografi, Universitas Indonesia
Gedung Nathanael Iskandar Lt.2 & 3 Kampus UI Depok 16424
Telp/Faks (021) 7872911/ (021) 7872909
Email: sonny_harmadi@yahoo.com

Tanggal diterima 1 Juli 2014, direvisi 30 September 2014, disetujui terbit Oktober 2014

Abstrak

Meskipun tidak melibatkan transmigran dalam jumlah besar, program transmigrasi dianggap masih memiliki peran penting dalam kebijakan pengembangan wilayah dan persebaran penduduk yang lebih merata. Di masa mendatang, kebijakan transmigrasi perlu ditingkatkan dalam skala yang lebih besar, karena bisa memberi manfaat dalam mengurangi tekanan penduduk di daerah padat, dan menyediakan tenaga kerja bagi daerah berpenduduk sedikit. Kebijakan ini menjadi lebih optimal jika pemerintah mampu mengidentifikasi karakteristik individu yang memiliki peluang paling besar untuk melakukan migrasi. Berdasarkan hasil pengolahan Susenas 2012, individu yang tergolong sebagai migran sebanyak 7.452.361 orang dengan komposisi 49,37 persen bermigrasi antarkabupaten/kota dalam provinsi, 31,97 persen bermigrasi antarprovinsi dalam pulau dan 18,67 persen lainnya bermigrasi antarprovinsi antarpulau. Salah satu temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kelompok laki-laki, berusia produktif (15 – 50 tahun), berpendidikan rendah (SD ke bawah), tidak/belum kawin yang berasal dari Pulau Jawa memiliki probabilitas (peluang) yang paling besar untuk melakukan migrasi antarpulau dengan tujuan bekerja dan tinggal di daerah perdesaan. Kelompok ini dapat diidentifikasi sebagai kelompok yang berpotensi besar menjadi transmigran penduduk asal.

Kata Kunci: migrasi, transmigrasi, demografi, pembangunan

Abstract

Transmigration program is considered as having significant roles in regional development and population distribution. In the future, the program coverage shall be increased due to its benefits in decreasing population pressure on over populated areas and providing workforce for less densely areas. The policy would be optimum if the government is able to identify individual characteristics with the highest probability to migrate. Based on the processing of Susenas 2012 data, the number of individual migrants is 7,452,361 people, comprises of 49.37 percent as interdistrict/intercity within province migration, 31.97 percent as interprovincial within island migration, and 18.67 percent as interprovincial among islands migration. The study shows that the male group of productive age (15 to 50 years), with low education (elementary school and below), single, from Java island has the highest probability to migrate inter-island to work and live in rural areas. This group can be identified as a group of high potential to be transmigrants from origin areas.

Keywords: migration, transmigration, demography, development

I. PENDAHULUAN

Dengan kepadatan penduduk sekitar 124 jiwa per km², Indonesia bukan termasuk negara berpenduduk terlalu padat. Akan tetapi, masalah

utama yang dihadapi adalah persebaran penduduk yang tidak seimbang. Pulau Jawa, yang memiliki luas 6,77 persen dari keseluruhan luas Indonesia dihuni oleh 57,49 persen penduduk. Sementara itu, Pulau Kalimantan yang luasnya 28,48 persen hanya

dihuni oleh 5,8 persen penduduk saja. Demikian pula halnya dengan Kepulauan Maluku-Papua yang memiliki luas 25,9 persen tetapi hanya dihuni oleh 2,59 persen penduduk saja. Informasi yang ada pada Tabel 1 menunjukkan bahwa Pulau Jawa adalah pulau dengan jumlah penduduk terbanyak, diikuti dengan Pulau Sumatera yang penduduknya mencapai 21,31 persen.

Selain menghadapi masalah persebaran penduduk yang tidak merata, Indonesia juga dihadapkan pada masalah ketimpangan pendapatan. Informasi yang ada pada Tabel 2 memperlihatkan bahwa Pulau Jawa merupakan pusat perekonomian dan menyumbang 57,63 persen pendapatan nasional. Sementara itu, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Kepulauan Bali-Nusa Tenggara dan Kepulauan Maluku-Papua secara keseluruhan hanya menyumbang tidak lebih dari 20 persen pendapatan nasional. Berhadapan dengan dua masalah tersebut,

Secara konseptual, transmigrasi merupakan bagian dari kebijakan pengendalian penduduk¹, karena merupakan salah satu bentuk migrasi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk. Namun demikian, berdasarkan sejarahnya, transmigrasi yang didesain sejak jaman penjajahan Belanda (dulu disebut dengan istilah kolonisasi) tidak hanya bertujuan untuk redistribusi penduduk antarpulau saja, melainkan juga untuk memperbaiki kesejahteraan penduduk.

Sejarah transmigrasi di Indonesia selama periode 1905-1942 telah memindahkan hampir 232 ribu jiwa yang mencakup sekitar 60 ribu KK. Sepanjang periode tersebut, fakta menunjukkan bahwa perpindahan migran umumnya terjadi antarpulau, dimana sebagian besar migran berasal dari Pulau Jawa berpindah ke beberapa pulau lainnya terutama Sumatera, dan Sulawesi, serta sebagian kecil ke Kalimantan.

Tabel 1. Luas Wilayah, Jumlah dan Distribusi Penduduk Indonesia, 2010

Pulau Besar	Luas (km ²)	Persentase terhadap Luas Indonesia	Jumlah Penduduk	Persentase terhadap Jumlah Penduduk Indonesia	Kepadatan Penduduk per km ²
Sumatera	480.793,28	25,16	50.630.931	21,31	105,31
Jawa	129.438,28	6,77	136.610.590	57,49	1.055,41
Kalimantan	544.150,07	28,48	13.787.831	5,80	25,34
Sulawesi	188.522,36	9,87	17.371.782	7,31	92,15
Bali-NTB-NTT	73.070,48	3,82	13.074.796	5,50	178,93
Maluku-Papua	494.956,85	25,90	6.165.396	2,59	12,46
Indonesia	1.910.931,32	100,00	237.641.326	100,00	

Sumber: BPS (2014a), diolah

Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto dan Persentase terhadap PDB atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2011*

Pulau Besar	PDRB (Rp triliun)	Persentase terhadap PDB
Sumatera	1.417,20	23,54
Jawa	3.470,20	57,63
Kalimantan	509,50	8,46
Sulawesi	306,50	5,09
Bali-NTB-NTT	189,40	3,15
Maluku-Papua	128,30	2,13
Indonesia	6.021,10	100,00

Catatan: * angka sangat sementara

Sumber: BPS (2011), diolah

transmigrasi menjadi relevan sebagai alat pembangunan di masa depan. Transmigrasi dapat menjadi media untuk pemerataan persebaran penduduk sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan sekaligus sebagai sarana pemerataan pembangunan ekonomi.

¹ Kebijakan pengendalian penduduk didefinisikan sebagai tindakan-tindakan pemerintah berupa hukum-hukum, aturan-aturan dan program-program yang mempengaruhi tiga komponen utama pertumbuhan penduduk yaitu kelahiran, kematian dan migrasi. Kebijakan pengendalian penduduk tentunya diharapkan dapat mempengaruhi pembangunan sosial dan ekonomi, baik secara nasional maupun daerah.

Pasca kemerdekaan RI, khususnya masa Orde Baru, jumlah transmigran yang ditempatkan di daerah baru mengalami kenaikan. Pada Pelita I (1969-1974), sebanyak lebih dari 46 ribu KK menjadi transmigran dengan daerah penempatan terbesar meliputi Lampung, Sumsel, dan Sulsel. Selama Pelita II (1974-1979), jumlah transmigran naik menjadi hampir 83 ribu KK dengan daerah tujuan penerima paling banyak diantaranya Jambi, Sumsel, dan Sulteng. Jumlah transmigran terus meningkat menjadi lebih dari 371 ribu KK pada Pelita III (1979-1984), dimana Sumatera menjadi daerah penempatan terbesar. Di Pelita IV (1984-1989), jumlah transmigran mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah Indonesia, lebih dari 750 ribu KK menjadi transmigran dan 521 ribu diantaranya adalah transmigran swakarsa. Lebih lanjut, data Pusdatintrans (Kemenakertrans, 2014b) menunjukkan di tahun 2012 lalu terdapat sekitar 3.101 KK yang menjadi transmigran. Dengan begitu, kebijakan transmigrasi berkembang sehingga mendukung kebijakan pengembangan wilayah dan integrasi nasional melalui pembauran etnis/suku yang sangat beragam di Indonesia. Hingga tahun 2013, sebagian besar kawasan transmigrasi tersebar terutama di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi dan sebagian kecil di Papua, seperti yang diilustrasikan oleh gambar berikut.

Fungsi pembangunan transmigrasi relevan dengan program pengembangan wilayah dalam rangka mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah melalui pembangunan kawasan permukiman transmigrasi, baik yang terkonsentrasi maupun yang tidak terkonsentrasi, baik yang dibangun untuk tujuan pengembangan wilayah (kawasan), baik wilayah itu sendiri maupun untuk menopang wilayah lain. Dengan kata lain, pembangunan kawasan dalam kerangka transmigrasi masih relevan sebagai penopang pertumbuhan kawasan yang lebih besar. Pembangunan kawasan baru untuk transmigrasi dilakukan secara selektif dan dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan pendekatan kewilayahan, yaitu mempercepat proses pembangunan daerah dengan terbentuknya pusat pertumbuhan ekonomi.

Pada masa lalu, penyelenggaraan transmigrasi lebih mempertimbangkan untuk mengisi kawasan kosong penduduk dengan memindahkan penduduk dari daerah padat. Kini, sesuai dengan tuntutan kebutuhan hidup yang lebih mengedepankan pemberdayaan masyarakat, paradigma penyelenggaraan transmigrasi pun bergeser, dari distribusi penduduk menjadi berorientasi kepada kesejahteraan rakyat yang berimplikasi pada pembangunan regional. Dengan bergesernya

Gambar 1. Peta Sebaran Kawasan Transmigrasi Seluruh Indonesia



Sumber: Direktorat Jenderal P2KTrans, 2014

orientasi tersebut, maka aspek demografis merupakan aspek penting yang harus diperhatikan.

Dalam suasana politik nasional yang sering tidak stabil dan disertai dengan berbagai gejolak sosial dan pertikaian etnik di berbagai wilayah, transmigrasi kemudian secara pragmatis digunakan untuk menangani korban-korban sosial. Saleh (2005) menyebutkan bahwa sejak awal kemerdekaan hingga kini, paling tidak sisi pragmatis transmigrasi dapat dibedakan menjadi tiga kategori. *Pertama*, model pengembangan wilayah. Model ini bersifat *induced migration*. *Kedua*, model *resettlement*, yang membuahkan *forced migration*. *Ketiga*, model transmigrasi swakarsa atau dikenal dengan *spontanouse migration*.

Dengan definisi di atas, maka transmigrasi bukan sekedar perpindahan antarpulau, yang dipahami oleh kebanyakan orang. Bahkan transmigrasi tidak lagi merupakan program pemindahan penduduk, melainkan upaya untuk pengembangan wilayah. Metodenya tidak lagi bersifat sentralistik dan *top down* dari Jakarta, melainkan berdasarkan Kerjasama Antar Daerah pengirim transmigran dengan daerah tujuan transmigrasi. Penduduk setempat semakin diberi kesempatan besar untuk menjadi transmigran penduduk setempat (TPS), proporsinya hingga mencapai 68:32 dengan transmigran penduduk asal (TPA) pada tahun 2013. Namun begitu, di antara transmigran penduduk asal, lebih dari 85 persen berasal dari Pulau Jawa.

Tabel 3. Proporsi Transmigran Penduduk Setempat (TPS) dan Transmigran Penduduk Asal (TPA), 2010-2013

Tahun	TPS	TPA	TPS + TPA
2010	61,9	38,1	7.346
2011	60,6	39,4	7.274
2012	64,5	35,5	7.546
2013	67,8	32,2	6.487

Sumber: Kemenakertrans (2014a, 2014b, 2014c)

Tahun	TPA Jawa	TPA Non Jawa	Total TPA
2010	84,9	15,1	2.802
2011	87,9	12,1	2.868
2012	86,4	13,6	2.679
2013	88,3	11,7	2.088

Produk hukum terkini yang mengatur tentang transmigrasi adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014. Menurut UU Nomor 29 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 2, transmigrasi didefinisikan sebagai perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan pemerintah. Sementara itu, pada Pasal 1 Ayat 4, kawasan transmigrasi didefinisikan sebagai kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi.

Dua produk hukum ini mengubah peraturan sebelumnya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999. Pada UU Nomor 15 Tahun 1997 Pasal 1 Ayat 2, transmigrasi diartikan sebagai perpindahan penduduk secara sukarela untuk peningkatan kesejahteraan dan menetap di Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) atau Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT). Dalam definisi tersebut, WPT dan LPT merupakan tempat-tempat tujuan transmigrasi yang secara khusus dirancang, disediakan dan atau “dibangun” oleh pemerintah (Saleh, 2005).

Hasil Sensus Penduduk 2010 mencatat terdapat 5.396.419 orang atau sekitar 2,5 persen penduduk merupakan migran masuk risen antarprovinsi. Persentase migran risen di daerah perkotaan tiga kali lipat lebih besar migran risen di daerah perdesaan, masing-masing sebesar 3,8 dan 1,2 persen. Menurut jenis kelamin, jumlah migran laki-laki lebih banyak daripada migran perempuan, 2.830.114 berbanding 2.566.305 orang. Seks rasio migran risen adalah 110,3. Data tersebut menunjang teori bahwa migrasi lebih banyak menuju daerah perkotaan dan sebagian besar dilakukan oleh laki-laki. Beberapa provinsi yang merupakan daerah tujuan migran antara lain adalah Kepulauan Riau, Papua Barat, dan DI Yogyakarta. Daerah-daerah ini mempunyai daya tarik tersendiri bagi migran. Pada umumnya, alasan utama para migran ini pindah adalah karena pekerjaan, mencari pekerjaan, atau sekolah (BPS, 2014a).

Seperti yang diungkapkan oleh Siswono Yudohusodo (1998) dalam Sardjadidjaja (2005), pelaksanaan transmigrasi tidak mudah, mengingat penduduk berpindah dari daerah yang lebih maju (khususnya Jawa) ke daerah lain yang justru belum berkembang. Padahal, migrasi secara spontan justru memiliki kecenderungan penduduk berpindah dari daerah yang kurang maju ke daerah yang lebih maju.

Dengan begitu, maka pemahaman mengenai pola dan bagaimana keputusan bermigrasi diperlukan untuk memberikan *insight* bagaimana keputusan transmigrasi dilakukan, terutama di Indonesia.

Penasehat khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Jeffrey Sach, mengungkapkan bahwa pertumbuhan penduduk yang tinggi pada negara-negara berkembang akan berdampak pada dunia secara keseluruhan, terutama meningkatnya arus migrasi dan kecenderungan konflik akibat migrasi tersebut. Peningkatan arus migrasi menunjukkan gejala adanya revolusi mobilitas. Paling tidak, ada dua alasan yang mendorong terjadinya revolusi mobilitas di Indonesia. Pertama, akibat adanya penurunan angka kelahiran. Dengan penurunan angka kelahiran, jumlah anak dalam keluarga berkurang, dan orang tua memiliki waktu luang yang lebih banyak, sehingga pengambilan keputusan migrasi menjadi lebih mudah. Kedua, akibat adanya perbaikan sarana dan prasarana transportasi daerah. Saat ini begitu banyak angkutan berbiaya murah (*low cost carrier*) yang memudahkan mobilitas penduduk antardaerah. Ketiga, meningkatnya teknologi informasi dan komunikasi memudahkan penduduk untuk memperoleh informasi tentang peluang di daerah lain.

Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif (migrasi internal) atau batas politik/negara (migrasi internasional). Dengan kata lain, migrasi diartikan sebagai perpindahan yang relatif permanen dari suatu daerah (negara) ke daerah (negara) lain. Ada dua dimensi penting dalam penalaahan migrasi, yaitu dimensi ruang/daerah (spasial) dan dimensi waktu. Digunakan batasan waktu untuk migran karena seseorang dikatakan migran, jika dia tinggal di tempat yang baru atau berniat tinggal di tempat yang baru itu paling sedikit 6 bulan lamanya.

Migrasi sebagai bentuk perpindahan, baik sementara maupun permanen, yang dilakukan individu atau kelompok dari satu wilayah ke wilayah lain karena berbagai macam alasan, mulai dari mencari kesempatan pekerjaan yang lebih baik sampai karena diskriminasi. Secara formal, migrasi didefinisikan sebagai perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain yang melampaui batas politik/negara ataupun batas administrasi/batas bagian suatu negara. Jika melampaui batas negara maka disebut dengan migrasi internasional. Sementara itu, jika perpindahan terjadi dalam batas wilayah suatu

negara, baik antardaerah maupun antarprovinsi disebut dengan migrasi internal. Dengan begitu, migrasi sering diartikan sebagai perpindahan yang relatif permanen dari suatu daerah ke daerah lain. Pindahnya penduduk ke suatu daerah tujuan disebut dengan migrasi masuk sedangkan perpindahan penduduk ke luar daerah disebut dengan migrasi keluar (Depnaker, 1995 dalam Safrida, 2008).

Meskipun aktivitas migrasi sama tuanya dengan peradaban itu sendiri, akan tetapi teori migrasi adalah hal yang relatif baru. Salah satu penulis pertama tentang migrasi modern adalah E. G. Ravenstein, yang melalui tiga artikelnya merumuskan “sebelas hukum migrasi” (atau lebih tepatnya hipotesis) berdasarkan hasil penelitian empirisnya. Grigg (1977) merangkumnya sebagai berikut. *Pertama*, sebagian besar migran berpindah dalam jarak yang dekat. *Kedua*, migrasi dilakukan secara bertahap, dari desa ke kota kecil kemudian ke kota besar. *Ketiga*, migrasi jarak jauh umumnya dilakukan jika daerah yang dituju adalah pusat perdagangan atau industri. *Keempat*, setiap arus migrasi menimbulkan arus migrasi penggantinya. *Kelima*, penduduk perkotaan cenderung tidak bermigrasi dibandingkan dengan penduduk pedesaan. *Keenam*, sebagian besar perempuan melakukan migrasi dalam jarak pendek sedangkan laki-laki dalam jarak yang lebih jauh. *Ketujuh*, sebagian besar migran adalah individu dewasa, jarang sekali satu keluarga utuh bermigrasi keluar dari tempat lahir. *Kedelapan*, sebagian besar kota berkembang karena migrasi, bukan karena perubahan penduduk yang alami. *Kesembilan*, volume migrasi bertambah seiring dengan berkembangnya industri, perdagangan dan transportasi. *Kesepuluh*, arah migrasi yang utama adalah dari daerah agrikultural ke pusat industri dan perdagangan. *Kesebelas*, faktor ekonomi adalah penyebab utama migrasi.

Model migrasi awal (seperti Zipf, 1946) menggunakan konsep fisik dari gravitasi dan menjelaskan migrasi sebagai fungsi dari ukuran populasi di daerah asal dan daerah tujuan, dan diperkirakan berhubungan terbalik dengan jarak. Model migrasi tahun 1950an bergeser dari model yang sepenuhnya mekanis ke teori yang lebih canggih. Teori yang memprediksi arus migrasi pertama kali diperkenalkan dalam model *dual-economy* Lewis pada tahun 1950-1960an, yang menurutnya, migrasi terjadi akibat perbedaan penawaran dan permintaan tenaga kerja antara daerah kota dan desa. Model Harris-Todaro di tahun 1970-1980an mengembangkan model ini

sehingga menjadi model migrasi yang sangat spesifik.

Sementara studi migrasi terdahulu menggunakan data agregat dan melihat migrasi sebagai mekanisme ekuilibrium, sejak tahun 1980an, fokus studi migrasi justru berkembang menjadi model mikroekonomi. Model ini menganalisis motivasi individu untuk bermigrasi dengan mempertimbangkan faktor struktur komunitas (misalnya kemiskinan). Model ini juga berkontribusi dalam membedakan penyebab dan kontinuitas migrasi. *The New Economics of Labour Migration* bahkan melihat migrasi sebagai keputusan rumahtangga dan menambahkan berbagai faktor penjelas migrasi lainnya (Hagen-Zanker, 2008).

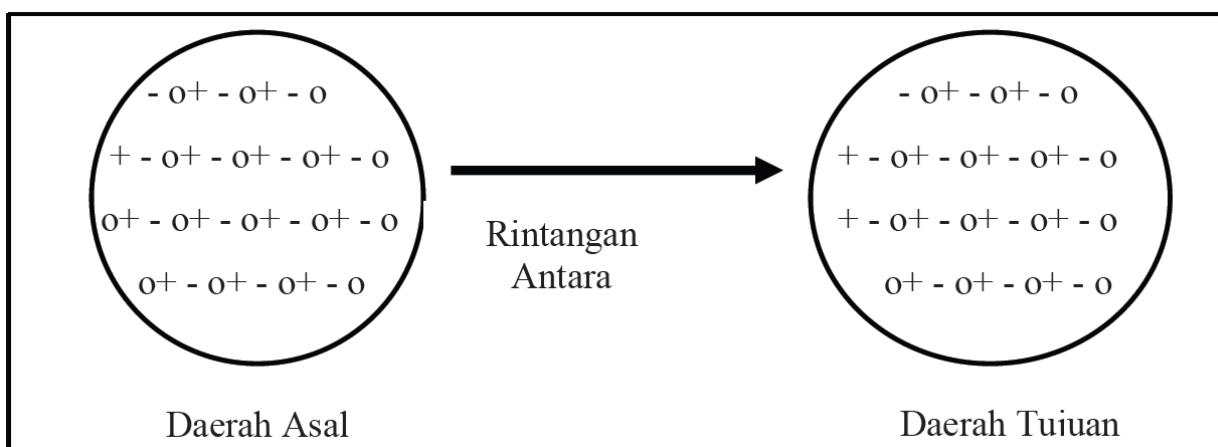
Secara umum, faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan migrasi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor-faktor pendorong (*push factors*) dan faktor-faktor penarik (*pull factors*). Yang termasuk dalam faktor-faktor pendorong antara lain adalah (i) makin berkurangnya sumber-sumber kehidupan, seperti menurunnya daya dukung lingkungan dan menurunnya sumber daya alam; (ii) makin sempitnya kesempatan kerja; (iii) adanya tekanan politik, agama, suku dan ras; (iv) alasan pendidikan, pekerjaan, dan perkawinan; dan (v) bencana alam. Sementara itu, yang termasuk dalam faktor-faktor penarik antara lain adalah (i) harapan memperoleh kesempatan memperbaiki kehidupan; (ii) kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih baik; (iii) lingkungan dan kehidupan yang menyenangkan; dan (iv) aktivitas kota besar yang menarik (Munir, 2011).

Menurut Lee (1966) terdapat empat faktor yang perlu diperhatikan dalam studi migrasi penduduk, yaitu: (i) faktor-faktor daerah asal; (ii) faktor-faktor yang terdapat pada daerah tujuan; (iii) rintangan-rintangan yang menghambat (rintangan antara); dan (iv) faktor-faktor individual. Ketiga faktor pertama dapat diilustrasikan oleh gambar 2 berikut.

Di setiap daerah terdapat faktor-faktor yang menahan seseorang untuk tidak meninggalkan daerahnya atau justru menarik orang untuk pindah ke daerah tersebut (*pull factors* yang digambarkan dengan simbol +), dan ada pula faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk meninggalkan daerah tersebut (*push factors* yang digambarkan dengan simbol -). Selain itu ada pula faktor-faktor yang tidak berpengaruh terhadap keputusan bermigrasi (digambarkan dengan simbol 0). Rintangan antara merupakan faktor yang menghalangi seseorang untuk bermigrasi, seperti undang-undang migrasi dan biaya transportasi. Rintangan migrasi memiliki pengaruh yang berbeda pada orang-orang yang mempertimbangkan untuk pindah. Sebagian orang memandang rintangan tersebut sebagai hal yang mudah untuk diatasi, sementara sebagian lain mungkin memandang sebaliknya.

Dibandingkan dengan ketiga faktor di atas, faktor individu adalah faktor yang sangat menentukan keputusan bermigrasi. Faktor-faktor individu bukanlah faktor nyata yang terdapat di daerah asal maupun di daerah tujuan, akan tetapi ini merupakan persepsi seseorang terhadap faktor-faktor tersebut. Kepekaan pribadi, kecerdasan, serta kesadaran akan kondisi di tempat lain dapat mempengaruhi evaluasi seseorang mengenai

Gambar 2. Faktor-Faktor di Daerah Asal dan Daerah Tujuan, serta Faktor Penghambat dalam Bermigrasi



Sumber: Lee (1966)

keadaan di daerah asal. Pengetahuan tentang tempat tujuan bergantung pada sumber informasi dan jaringan yang tersedia. Untuk sebagian orang, perlu ada alasan yang benar-benar memaksa sehingga ia mau pindah. Akan tetapi, untuk sebagian orang yang lain, sedikit dorongan saja cukup menjadi alasan baginya untuk pindah (Lee, 1966).

Menurut Ravenstein dalam Grigg (1977), meskipun terdapat beragam motivasi untuk melakukan migrasi, namun alasan ekonomi selalu lebih dominan dibandingkan alasan lainnya. Migrasi juga memiliki asosiasi dengan jarak, dimana tingkat migrasi antardua titik akan berhubungan terbalik dengan jarak di antara kedua titik tersebut². Para migran yang bersedia untuk migrasi jarak jauh umumnya menuju pusat-pusat industri.

Todaro (1998) menyatakan bahwa migrasi merupakan keputusan yang sangat selektif, tergantung kepada karakteristik individu. Karakteristik migran dapat dibedakan menjadi tiga kategori. *Pertama*, karakteristik demografi. Berdasarkan karakteristik demografi, umumnya migran di negara berkembang adalah pemuda usia 15 – 24 tahun. Migran perempuan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu (i) migran pengikut, ini terdiri dari para istri dan anak-anak perempuan yang mengikuti suami atau ayah; dan (ii) migran solo, yaitu perempuan yang bermigrasi tanpa disertai siapa pun. Kelompok yang terakhir ini diperkirakan jumlahnya semakin bertambah pesat.

Kedua, karakteristik pendidikan. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang nyata antara jenjang pendidikan yang ditamatkan dengan kemungkinan atau dorongan untuk bermigrasi (*propensity to migrate*). Seseorang yang memiliki pendidikan tinggi memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk bermigrasi. Hal ini disebabkan karena kesempatan kerja sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Dengan begitu, semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin besar keinginan memperoleh pekerjaan, dan karenanya semakin besar kemungkinan untuk bermigrasi.

Ketiga, karakteristik ekonomi. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase migran terbesar adalah mereka yang miskin, tidak memiliki tanah, tidak memiliki keahlian dan yang tidak memiliki kesempatan untuk maju di daerah asalnya. Para migran dari daerah pedesaan, yang mayoritas berasal dari golongan miskin, sengaja pindah secara

permanen untuk mencari kehidupan yang lebih baik dan melepaskan diri dari belenggu kemiskinan di daerah pedesaan. Menurut teori investasi sumber daya manusia, keputusan seseorang untuk bermigrasi dalam rangka memperoleh penghasilan yang lebih tinggi dan kehidupan yang baik merupakan tindakan investasi.

Penelitian mengenai migrasi umumnya dilakukan dalam skala mikro dan spasial/wilayah. Safrida (2008) mengemukakan beberapa temuan empiris peneliti terdahulu berkaitan dengan pola dan kecenderungan migrasi di Indonesia. Dalam analisis Ananta et. al. (1999) dalam Safrida (2008) diketahui bahwa peristiwa migrasi terjadi lebih banyak pada saat usia anak-anak dan usia tua. Di antara kedua masa tersebut, individu lebih banyak menjadi *mover*. Anak-anak umumnya mengikuti orang tua sehingga pada usia ini, migran lebih banyak daripada *mover*. Selepas usia anak-anak (usia muda), sebagian besar individu mencari dan atau bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup hingga ke luar tempat tinggal. Dengan begitu, di usia ini, lebih banyak migran. Ketika memasuki usia tua, mereka lebih senang bekerja di tempat tinggal sendiri, menjadikan jumlah migran di usia ini menurun. Pada studi yang sama juga ditemukan bahwa faktor-faktor pendorong memiliki pengaruh dominan terhadap keputusan migrasi.

Adriani (2000) dalam Safrida (2008) menyimpulkan bahwa penurunan jumlah angkatan kerja di pedesaan dipengaruhi oleh migrasi dari desa ke kota. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan migrasi desa-kota secara besar-besaran akan mengakibatkan kelangkaan angkatan kerja di pedesaan, dan sebaliknya menimbulkan *excess* angkatan kerja di perkotaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa upah riil di luar Pulau Jawa lebih tinggi dibandingkan upah riil di Pulau Jawa. Oleh karena upah merupakan salah satu faktor yang mendorong orang untuk bermigrasi, maka perbedaan upah riil ini diperkirakan akan mendorong terjadinya arus migrasi dari dan ke luar Pulau Jawa.

Dalam analisisnya, Supriyadi (2002) dalam Safrida (2008) menyimpulkan bahwa migrasi desa-kota lebih responsif terhadap perubahan upah riil di sektor industri. Sementara itu, migrasi kota-desa responsif terhadap perubahan jumlah penduduk laki-laki usia produktif di perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan migrasi desa-kota dipicu oleh faktor penarik. Sementara migrasi kota-desa disebabkan oleh faktor pendorong.

Dalam studinya, Desiar (2003) dalam Safrida (2008) menyatakan bahwa arus migrasi masuk ke

² Mengembangkan hipotesis yang dibuat oleh Zipf (1946)

Kota Jakarta meningkatkan pengangguran dan berkembangnya sektor informal dari tahun ke tahun. Faktor utama yang mempengaruhi migrasi ini adalah karena sulitnya mendapatkan pekerjaan di daerah asal. Walaupun berskala kecil, sulit mengakses lembaga keuangan formal, dan tidak dilindungi pemerintah, akan tetapi sektor informal tetap diminati oleh para migran. Ini disebabkan karena untuk masuk ke sektor ini cukup mudah, tidak memerlukan izin usaha, tidak memerlukan pendidikan tinggi dan tidak membutuhkan modal besar.

Dalam penelitiannya, Tarigan (2004) dalam Safrida (2008) menemukan bahwa alasan ekonomi dan alasan sosial merupakan faktor pendorong sekaligus faktor penarik terjadinya migrasi desa-kota yang identik dengan transformasi kegiatan ekonomi pertanian-industri. Proses adaptasi migran sirkuler dipercepat oleh aksi migran terdahulu. Cara adaptasi yang paling dominan dilakukan oleh para migran adalah dengan menerapkan bentuk kehidupan desa, yaitu dengan membentuk komunitas dari daerah asal dan menggunakan bahasa daerah untuk berkomunikasi. Cara ini dianggap dapat menetralkan kegugupan sosial dan menghadirkan rasa aman secara psikologis. Migran cenderung memiliki budaya transisi dengan menjadi masyarakat modern di daerah asal akan tetapi menjadi manusia tradisional di daerah tujuan.

Pengalaman hidup seorang individu sebelum melakukan migrasi mendorong individu tersebut melakukan migrasi. Agregasi dari keputusan individu, di bawah pengaruh variabel kontekstual seperti jejaring sosial dan ekonomi, menentukan arus migrasi populasi (Barker, 2010). Migrasi antarwilayah dapat disebabkan karena populasi di wilayah asal begitu besar (Zipf, 1946), yang diasumsikan merefleksikan kondisi ekonomi lokal yang sulit dan efek dari skala pasar kerja (Finnie, 2004).

Migrasi antarwilayah yang memiliki kesenjangan ekonomi dianggap lebih berat karena pertimbangan rasional yang diputuskan oleh individu dalam bermigrasi adalah untuk memaksimalkan kondisi ekonominya (Lim, 2011 dalam Jacobs, 2012). Oleh karena itu, migrasi dalam jarak yang jauh cenderung dilakukan oleh migran muda berpendidikan tinggi (Kodrzycki, 2001). Dalam studinya di Kanada, Finnie (2004) menemukan bahwa umur berpengaruh negatif terhadap keputusan bermigrasi. Hal ini membuat perbedaan umur menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan dalam mempelajari migrasi (Jacobs, 2012).

Umur dan pendidikan memegang peran penting dalam keputusan migrasi. Plain dan Heins (2003) dalam Arbex dan Freguglia (*undated*) menemukan bahwa *propensity to migrate* menurun seiring dengan bertambahnya umur migran. Semakin tua umur migran, semakin rendah tingkat pengembalian (*rate or returns*) investasi sumber daya manusia (*human capital*) karena migrasi. Menurut Lucas (1997), hal ini konsisten dengan model investasi sumber daya manusia melalui migrasi.

Jenjang pendidikan yang tinggi mendorong probabilitas migrasi keluar dari suatu wilayah yang tingkat industrialisasinya rendah. Sejalan dengan itu, jenjang pendidikan mendorong terjadinya migrasi antarwilayah menuju wilayah yang tumbuh dengan pesat. Perubahan struktur ekonomi juga berpengaruh terhadap perubahan bentuk jejaring sosial, yang turut menentukan keputusan individu untuk bermigrasi. Dengan begitu, maka keputusan bermigrasi dari satu wilayah ke wilayah lainnya sebagian ditentukan oleh perubahan kondisi makroekonomi tersebut (Jacobs, 2012).

Pendidikan berkaitan erat dengan *marketable skills* yang memungkinkan dilakukannya migrasi. Dengan begitu, individu yang memiliki keterampilan yang rendah memiliki kecenderungan bermigrasi yang rendah pula karena keterampilannya tidak dapat diaplikasikan ke dalam perekonomian (Pennell, 2007 dalam Jacobs, 2012). Dengan keterbatasan keterampilan, maka kesempatan kerja menjadi terbatas pula bagi individu yang bersangkutan. Dan karenanya, menurunkan kemampuan untuk bermigrasi (Jacobs, 2012). Akan tetapi, dalam studinya di Brazil, Arbex dan Freguglia (*undated*) menemukan bahwa pekerja dengan pendidikan rendah justru memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk bermigrasi dan kemudian bekerja di sektor informal.

Persentase laki-laki yang bermigrasi mengalami penurunan sedikit demi sedikit, sementara persentase migran perempuan justru sedikit demi sedikit mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan adanya tren migrasi yang divergen menurut gender (Finnie, 2004). Ukuran rumah tangga adalah faktor lain yang berpengaruh terhadap migrasi. Rumah tangga dengan ukuran yang lebih besar memiliki kecenderungan yang lebih rendah untuk bermigrasi, kecuali ada faktor eksternal yang memaksa, yang menyebabkan probabilitas rumah tangga bermigrasi meningkat lebih besar (Odland dan Ellis, 1988 dalam Jacobs, 2012). Faktor eksternal yang dimaksud antara lain adalah bencana dan kerusuhan sosial-politik.

Meskipun isu status ekonomi penting untuk dipertimbangkan, namun variabel ini bervariasi menurut umur, dimana pertimbangan migran berusia muda terhadap peluang ekonomi lebih tinggi dibandingkan dengan migran berusia tua (Morgan dan Robb, 1981 dalam Jacobs, 2012).

Arus migrasi umumnya terjadi dari wilayah yang perekonomiannya bergerak di bidang non-industri ke wilayah yang perekonomiannya tumbuh dan berkembang di bidang industri (Jacobs, 2012). Secara umum, arus migrasi terlihat dari wilayah yang pendapatan per kapitanya rendah ke wilayah yang pendapatan per kapitanya tinggi (Arbex dan Freguglia, *undated*).

Menurut studinya, Finnie (2004) menyatakan bahwa kecenderungan migrasi antarprovinsi umumnya dilakukan oleh individu yang berasal dari wilayah atau kota kecil, terutama daerah pedesaan. Status perkawinan dan adanya balita berpengaruh negatif terhadap keputusan bermigrasi, baik bagi laki-laki maupun perempuan (Finnie, 2004).

Sejak tulisan Sjaastad (1962), teori migrasi awal menyatakan bahwa keputusan migrasi terutama didasarkan atas ekspektasi pendapatan di daerah tujuan, relatif terhadap pendapatan di daerah asal, dengan mempertimbangkan biaya migrasi (Borjas, 1999). Lebih jauh lagi, keputusan migrasi tenaga kerja juga turut memperhitungkan faktor lainnya, seperti atribut yang melekat pada individu secara personal dan karakteristik lokasi. Karakteristik-karakteristik ini secara intrinsik berkaitan dengan *propensity to migrate* dari seorang individu (Greenwood, 1975 dalam Arbex dan Freguglia, *undated*).

Migrasi dalam jarak yang dekat umumnya dianggap *less costly* dibandingkan dengan migrasi jarak jauh, bukan hanya berkaitan dengan biaya transportasi saja, tetapi juga berkaitan dengan seberapa banyak *prior information* yang dimiliki sebelum individu memutuskan untuk pindah. Informasi spesifik mengenai wilayah yang dekat dengan tempat asal lebih mudah untuk dikumpulkan daripada wilayah yang jaraknya jauh. Misalnya saja, akan lebih mudah bagi individu untuk mengetahui dan memahami kondisi sosial ekonomi di wilayah lain yang berdekatan dengan tempat asalnya. Dengan begitu, migrasi jarak dekat menjadi pilihan yang utama, apalagi jika transportasi yang infrastruktur pendukung lainnya yang tersedia memudahkan individu untuk pindah. Migrasi jarak jauh menjadi pilihan jika di tempat tujuan sudah ada jejaring sosial ekonomi yang dapat “menjamin” keberlangsungan hidup migran.

Bagaimanapun juga, pasca reformasi, Indonesia tidak memiliki desain yang kuat mengenai kebijakan transmigrasi. Persebaran penduduk antardaerah dan antarpulau yang tidak merata setidaknya dapat dikurangi melalui program transmigrasi. Sementara itu, investasi cenderung mendekati daerah yang memiliki pasar (penduduk) besar sehingga argumen aglomerasi menjadi pertimbangan utama investor dalam penentuan lokasi perusahaan. Tanpa kebijakan distribusi penduduk yang lebih baik, investasi akan cenderung terus terkonsentrasi di wilayah berpenduduk besar. Meskipun argumen *people follow jobs* sering digunakan, namun kenyataannya *jobs* seringkali yang mengikuti keberadaan *people*.

Aglomerasi secara konseptual memiliki manfaat baik dari sisi produksi maupun konsumsi. Dengan lokasi yang saling berdekatan, perusahaan akan menikmati manfaat skala produksi (*economies of scale*) yang lebih besar, limpahan pengetahuan (*knowledge spillover*), pengumpulan tenaga kerja (*labor pooling*), dan kesesuaian tenaga kerja yang dibutuhkan (*labor matching*). Selain itu, aglomerasi menciptakan *shopping externalities* yang memanfaatkan besarnya konsumen di wilayah aglomerasi tersebut. Oleh karenanya, berkumpulnya tenaga kerja yang tercermin dari besarnya jumlah penduduk sangat berperan dalam pembangunan daerah. Migrasi tenaga kerja (penduduk) ke suatu daerah akan memberikan manfaat aglomerasi bagi daerah tersebut, sehingga kebijakan transmigrasi relevan dikaitkan dengan pembangunan daerah.

Oleh karenanya, dengan mempertimbangkan teori dasar migrasi dan fakta di lapangan, pelaksanaan transmigrasi menghadapi berbagai kendala yang cukup sulit. Agar kebijakan transmigrasi dapat berjalan efektif dan memberikan dampak yang optimal terhadap tujuannya, maka setidaknya pemerintah perlu memperhatikan dua hal penting. Pertama, memahami pola dan karakteristik sosial demografi migran yang melakukan migrasi. Setiap individu tentu memiliki preferensi yang berbeda dalam melakukan migrasi. Ada yang melakukan migrasi antarkabupaten/kota dalam provinsi yang sama, ada yang bermigrasi antarkabupaten/kota antarprovinsi, dan ada pula yang bermigrasi antarprovinsi antarpulau. Hal kedua ialah mengetahui karakteristik sosial demografi penduduk daerah penerima migran (penduduk lokal). Kelompok ini juga memiliki persepsi yang berbeda dalam menerima pendatang. Sebagian cenderung memiliki persepsi/sikap positif terhadap

pendatang, sedangkan sebagian lainnya justru cenderung menolak dan bersikap negatif terhadap pendatang. Pengetahuan ini dibutuhkan untuk mengurangi kemungkinan adanya konflik sosial dan komunal akibat benturan antara migran dengan penduduk setempat.

Tulisan ini mencoba fokus pada hal pertama, yaitu mengetahui karakteristik sosial demografi individu yang memiliki peluang (probabilitas) besar untuk melakukan migrasi. Dengan mengetahui hal tersebut, diharapkan agar promosi program transmigrasi dapat ditargetkan secara khusus kepada kelompok-kelompok yang memiliki peluang besar untuk migrasi.

II. METODE

Fokus dalam tulisan ini ialah mengestimasi probabilitas migrasi antarwilayah berdasarkan pada karakteristik individu saja, tanpa mempertimbangkan lebih jauh terhadap faktor moneter (pendapatan) dan kondisi wilayah. Hal ini terutama dikarenakan keterbatasan set data, di mana tidak terdapat informasi mengenai pendapatan di daerah asal. Jadi, para migran diobservasi setelah migrasi dilakukan. Karena itu, asumsi yang digunakan dalam studi ini adalah bahwa para migran tidak memiliki informasi (yang lengkap) mengenai distribusi pendapatan di daerah tujuan.

Dalam tulisan ini, migrasi didefinisikan sebagai perpindahan tempat tinggal secara permanen yang dilakukan lima tahun sebelum data dikumpulkan. Dengan kata lain, migrasi yang dimaksud adalah migrasi risen. Berdasarkan daerah perpindahannya, migrasi dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu (a) migrasi antarkabupaten/kota dalam satu provinsi (MIG1); (b) migrasi antarprovinsi dalam satu pulau (MIG2); dan (c) migrasi antarprovinsi antarpulau (MIG3). Disagregasi berdasarkan pulau-pulau besar dilakukan agar terlihat perilaku migrasi masing-masing pulau. Adapun pulau-pulau di Indonesia dikelompokkan menjadi enam kelompok besar, yaitu (i) Sumatera; (ii) Jawa; (iii) Kalimantan; (iv) Sulawesi; (v) Bali-Nusa Tenggara; dan (vi) Maluku-Papua. Individu yang melakukan migrasi dalam lima tahun sebelum data dikumpulkan disebut dengan migran risen. Untuk selanjutnya dalam tulisan ini, migran (migrasi) risen cukup disebut dengan migran (migrasi) saja.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, penulis menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2012 triwulan III. Data Susenas 2012 mencakup 300.000 rumah tangga sampel yang

tersebar di seluruh provinsi dan 497 kabupaten/kota di Indonesia, setiap triwulan didistribusikan sebanyak 7.500 blok sensus atau 75.000 rumah tangga. Susenas menyediakan berbagai informasi mengenai indikator kependudukan, kesehatan, pendidikan, perumahan, sosial, ekonomi dan lainnya yang dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan rumah tangga dan anggota rumah tangga (BPS, 2014b).

Regresi multinomial logistik digunakan untuk mendapatkan faktor-faktor yang berasosiasi dengan kecenderungan (*odds*) jenis migrasi, apakah itu migrasi antarkabupaten/kota dalam provinsi (MIG1), migrasi antarprovinsi dalam pulau (MIG2) atau migrasi antarprovinsi antarpulau (MIG3). Keputusan migrasi ini bersifat *mutually exclusive* sehingga keputusan atas satu jenis migrasi tidak mungkin dibarengi dengan jenis migrasi lainnya. Karena ketiga jenis migrasi ini tidak berjenjang, maka data dianalisis dengan model regresi multinomial logistik³.

Kecenderungan bermigrasi menurut karakteristik migran dianalisis menggunakan metode multinomial logistik dengan migrasi antarkabupaten dalam provinsi (MIG1) sebagai basisnya. Secara matematis, keputusan migrasi dapat dituliskan menjadi persamaan berikut.

$$L_1 = \frac{\Pr_{\text{MIG2}}}{\Pr_{\text{MIG1}}} = b_0 + b_1 \text{DEMOG}_i + b_2 \text{DIDIK}_i + b_3 \text{EKO}_i + e_i \quad (1)$$

$$L_2 = \frac{\Pr_{\text{MIG3}}}{\Pr_{\text{MIG1}}} = c_0 + c_1 \text{DEMOG}_i + c_2 \text{DIDIK}_i + c_3 \text{EKO}_i + e_i \quad (2)$$

dengan

DEMOG_i = karakteristik demografi migran

DIDIK_i = karakteristik pendidikan migran

EKO_i = karakteristik ekonomi migran

Persamaan (1) memperlihatkan kecenderungan terjadinya migrasi antarkabupaten antarprovinsi (MIG2) relatif terhadap terjadinya migrasi antarkabupaten dalam provinsi (MIG1). Sementara itu, persamaan (2) memperlihatkan kecenderungan terjadinya migrasi antarprovinsi antarpulau (MIG3) relatif terhadap migrasi antarkabupaten dalam provinsi (MIG1).

Variabel dependen jenis migrasi diukur dengan membandingkan informasi tempat tinggal saat

³ Pembahasan mengenai model multinomial logit yang komprehensif dapat dilihat di Greene (2008) p. 843-845 dan Wooldrige (2010). Teknik estimasi multinomial logit menggunakan *software* statistik Stata dibahas secara mendetail pada Hamilton (2003) StataCorp (2009) dan Cameron dan Triverdi (2009).

disurvei dengan informasi tempat tinggal lima tahun sebelumnya. Karena tidak ada informasi yang pasti kapan migrasi dilakukan, maka diasumsikan bahwa migrasi terjadi dalam kurun waktu lima tahun sebelum survei dilakukan. Individu yang memiliki kedua informasi ini adalah individu yang pada saat disurvei berusia lima tahun ke atas. Migrasi antarkabupaten/kota dalam provinsi (MIG1) teridentifikasi ketika individu menyatakan bahwa kabupaten/kota tempat tinggal saat ini berbeda dengan lima tahun sebelumnya, akan tetapi provinsinya sama. Migrasi antarprovinsi dalam pulau (MIG2) teridentifikasi ketika individu menyatakan bahwa provinsi tempat tinggal saat disurvei berbeda dengan lima tahun sebelumnya akan tetapi masih di pulau yang sama. Sementara itu, migrasi antarprovinsi antarpulau (MIG3) terjadi jika baik provinsi maupun pulau tempat tinggal saat disurvei berbeda dengan lima tahun sebelumnya.

Variabel bebas yang berkaitan dengan jenis migrasi terdiri dari tiga komponen. *Pertama*, karakteristik sosial demografi seperti umur individu lima tahun sebelum disurvei, jenis kelamin, status kawin, daerah tempat tinggal saat disurvei, status kepala keluarga, dan jumlah anggota rumah tangga lima tahun sebelum disurvei. Status kawin dan status kepala keluarga diasumsikan tidak berubah sebelum dan setelah bermigrasi, dikontrol dengan umur anak termuda yang pada saat disurvei berusia lima tahun ke atas. Umur individu dan jumlah anggota rumah tangga berdasarkan informasi pada lima tahun sebelum survei (dan bukannya pada saat survei) dianggap lebih tepat sebagai faktor yang mempengaruhi keputusan untuk bermigrasi.

Kedua, karakteristik pendidikan, yaitu jenjang pendidikan yang ditamatkan individu. Jenjang pendidikan (dan bukannya lama sekolah/*years of schooling*) dipilih karena ini dapat digunakan sebagai “jembatan” untuk memperbaiki kesejahteraan hidup di tempat tujuan melalui bekerja. Seperti yang diketahui, jenjang pendidikan yang ditamatkan (dan karenanya ijazah yang dimiliki) merupakan sinyal yang paling jelas yang dapat digunakan individu agar diterima di pasar

kerja. Ijazah tersebut diharapkan mewakili produktivitas individu kepada pemberi kerja, walau produktivitas sesungguhnya hanya akan terobservasi setelah bekerja (Antarwati, 2012). Pendidikan dikelompokkan menjadi tiga: (i) pendidikan dikategorikan rendah jika individu hanya tamatan SD atau yang lebih rendah; (ii) pendidikan dikategorikan menengah jika individu berhasil menamatkan jenjang SMP atau SMA; dan (iii) pendidikan dikategorikan tinggi jika individu tamat jenjang pendidikan lebih tinggi dari SMA. *Ketiga*, karakteristik ekonomi diwakilkan oleh status bekerja.

Pembahasan juga diperkaya dengan analisis deskriptif yang memperlihatkan hubungan antara berbagai faktor demografi, pendidikan dan ekonomi yang berkaitan dengan tiga jenis migrasi, yang signifikansinya dijelaskan melalui uji χ^2 (*chi-square*). Perangkat statistik Stata digunakan untuk mengolah data. Dalam analisis deskriptif maupun analisis multinomial logistik, faktor penimbang diaplikasikan terhadap semua observasi sehingga mengikuti desain sampel Susenas 2012. Pembahasan dilakukan menurut jenis migrasi dan karakteristik demografi yang berpengaruh terhadapnya.

III.HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Susenas tahun 2012, individu yang tergolong sebagai migran sebanyak 7.452.361 orang dimana 49,37 persen bermigrasi antarkabupaten/kota dalam provinsi, 31,97 persen bermigrasi antarprovinsi dalam pulau dan 18,67 persen lainnya bermigrasi antarprovinsi antarpulau. Hal ini sesuai dengan temuan penelitian-penelitian lainnya bahwa migrasi cenderung dilakukan dalam jarak dekat. Hal ini didukung dengan infrastruktur dan transportasi yang baik, yang memudahkan individu dalam melakukan mobilitas. Semakin jauh jarak menuju daerah tujuan, semakin kecil kecenderungan untuk bermigrasi, kecuali ada jejaring sosial ekonomi yang dapat menjamin keberlangsungan hidup migran di daerah tujuan.

Tabel 4. Distribusi Migran Menurut Jenis Migrasi

Jenis Migrasi	Persentase	Jumlah Migran
Migrasi antarkabupaten/kota dalam provinsi	49,37	3.678.891
Migrasi antarkabupaten/kota antarprovinsi	31,96	2.382.383
Migrasi antarprovinsi antarpulau	18,67	1.391.087
Total	100,00	7.452.361

Sumber: BPS, 2012 b

Secara umum, Susenas tahun 2012 juga menunjukkan bahwa jumlah migran laki-laki lebih sedikit dari migran perempuan dengan rasio 94,93. Persentase migran risen di perkotaan 3 kali lebih besar dari migran di pedesaan, masing-masing sebesar 67,71 persen dan 32,29 persen. Temuan ini mendukung teori migrasi yang menyatakan bahwa migrasi cenderung dilakukan ke daerah perkotaan. Migran terdistribusi dalam berbagai latar belakang pendidikan. Secara umum, kelompok migran terbesar adalah lulusan SMP-SMA (53,55 persen) dan lulusan SD ke bawah (35,59 persen). Selain itu, tercatat pula 10,86 persen migran yang lulusan akademi/ perguruan tinggi. Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur adalah provinsi yang

persentase migran risennya paling besar, masing-masing sebesar 14,93 persen, 11,54 persen dan 10,16 persen. Selain ketiga provinsi tersebut, DKI Jakarta (6,28 persen), Banten (5,36 persen), Sumatera Utara (5,23 persen), dan Riau (4,33 persen) adalah provinsi berikutnya yang diminati migran risen (BPS, 2014b).

Tabel 5, memperlihatkan deskripsi migran menurut karakteristik dan jenis migrasi. Untuk **migrasi antarkabupaten/kota dalam provinsi**, proporsi migran perempuan relatif lebih banyak daripada migran laki-laki, masing-masing sebesar 52,77 persen dan 47,23 persen. Sebagian besar migran yang melakukan migrasi jenis ini adalah mereka yang berumur 15-50 tahun (69,18 persen)

Tabel 5. Distribusi Migran Menurut Karakteristik dan Jenis Migrasi

Karakteristik	Jenis Migrasi			Jumlah Migran
	Migrasi Antarkab/kot dalam Provinsi	Migrasi Antarkab/kot Antarprovinsi	Migrasi Antarprovinsi Antarpulau	
Jenis Kelamin ***				
Laki-laki	47,23	49,02	52,04	3.629.231
Perempuan	52,77	50,98	47,96	3.823.131
Umur saat migrasi***				
< 15 tahun	26,18	25,56	25,75	1.930.413
15 - 50 tahun	69,18	70,39	71,01	5.209.707
> 50 tahun	4,64	4,04	3,24	312.241
Tempat tinggal saat ini***				
Perkotaan	67,31	71,43	62,40	5.046.243
Perdesaan	32,69	28,57	37,60	2.406.118
Pendidikan***				
<= SD	35,33	35,29	36,78	2.652.231
SMP - SMA	53,53	54,22	52,48	3.991.017
> SMA	11,14	10,48	10,74	809.114
Status ketenagakerjaan***				
Bukan Angkatan Kerja	44,63	40,58	40,73	3.175.185
Bekerja	53,36	57,46	57,09	4.126.366
Pengangguran Terbuka	2,01	1,96	2,18	150.811
Status bekerja***				
tidak bekerja	46,64	42,54	42,91	3.325.995
bekerja	53,36	57,46	57,09	4.126.366
Status kawin				
tdk/blm kawin	44,95	46,84	48,46	3.443.909
kawin	55,05	53,16	51,54	4.008.453
Status Kepala Rumahtangga**				
KRT	28,64	27,67	29,04	5.335.405
Bukan KRT	71,36	72,33	70,96	2.116.956
Pulau Asal***				
Jawa	48,85	67,15	50,6	4.100.762
Bukan Jawa	51,15	32,85	49,4	3.351.599
Total	49,37	31,97	18,67	100,00
	3.678.891	2.382.383	1.391.087	7.452.361

*** Uji Chi Square signifikan pada $p < 0,001$

** Uji Chi Square signifikan pada $p < 0,05$

Sumber: BPS (Susenas 2012), diolah

dan saat ini tinggal di perkotaan (67,31 persen). Lebih dari separuh migran (53,53 persen) berpendidikan SMP-SMA, bekerja di daerah tujuan (53,36 persen). Proporsi migran yang melakukan migrasi antarkabupaten/kota cukup berimbang antara migran yang berada di Pulau Jawa maupun luar Pulau Jawa. **Migrasi antarkabupaten/kota antarprovinsi** sebagian besar dilakukan oleh migran berumur 15-50 tahun (70,39 persen), menuju perkotaan (71,43 persen), berpendidikan SMP-SMA (54,22 persen) untuk bekerja di daerah tujuan (57,46 persen). Sebagian besar dari kelompok migran ini bukan kepala rumah tangga (72,33 persen) dan berada di Pulau Jawa. Sementara itu, **migrasi antarprovinsi antarpulau** sebagian besar dilakukan oleh migran laki-laki (52,04 persen), berumur 15-50 tahun (71,01 persen) menuju perkotaan (62,40 persen) untuk bekerja (57,09) dengan pendidikan SMP-SMA (52,48 persen). Migrasi ini juga sebagian besar dilakukan oleh migran yang bukan kepala rumah tangga.

Dengan melihat karakteristik migran di ketiga jenis migrasi tersebut, dapat disimpulkan secara umum bahwa kecenderungan migrasi terlihat pada individu yang berumur 15-50 tahun, berpendidikan SMP-SMA, dan bukan kepala rumah tangga menuju perkotaan untuk bekerja. Kesemua variabel demografi, pendidikan dan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap masing-masing jenis migrasi kecuali status kawin. Hal ini ditunjukkan oleh uji *chi square* yang signifikan pada tingkat kepercayaan kurang dari satu persen (kecuali status kepala rumah tangga yang signifikan pada tingkat kepercayaan kurang dari lima persen).

Hasil estimasi multinomial logistik diperlihatkan oleh Tabel 6 berikut. *Reference base* yang digunakan dalam estimasi ini adalah migrasi antarkabupaten/kota dalam provinsi. Dengan begitu, interpretasi terhadap hasil estimasi untuk kedua jenis migrasi lainnya dibandingkan dengan *reference base* ini.

Migrasi antarkabupaten/kota antarprovinsi. Dibandingkan dengan migrasi antarkabupaten/kota dalam provinsi (MIG1), kecenderungan laki-laki untuk melakukan migrasi antarkabupaten/kota antarprovinsi lebih tinggi daripada perempuan, walaupun perbedaannya tidak besar. Menurut kelompok umur, individu berumur 15-50 tahun memiliki kecenderungan 1,16 kali lebih besar untuk melakukan migrasi jenis ini daripada mereka yang umurnya di atas 50 tahun. Kecenderungan kelompok umur ini untuk bermigrasi jenis kedua juga lebih tinggi dibandingkan

kelompok umur 15 tahun ke bawah. Kecenderungan lebih kecil ditunjukkan oleh migran yang menuju daerah perdesaan. Dengan kata lain, kecenderungan migrasi ke perkotaanlah yang lebih besar dibandingkan dengan yang menuju ke perdesaan. Individu dengan pendidikan SD ke bawah memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk bermigrasi, lebih besar daripada yang berpendidikan SMP-SMA. Individu yang bermigrasi juga memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk bekerja di daerah tujuan. Individu yang berperan sebagai kepala rumah tangga justru memiliki kecenderungan yang kecil untuk melakukan migrasi. Menurut daerah asal, migran yang berasal dari Pulau Jawa, memiliki peluang 2,11 kali lebih besar untuk melakukan migrasi jenis kedua ini (Tabel 6).

Migrasi antarprovinsi antarpulau. Dibandingkan dengan migrasi antarkabupaten/kota dalam provinsi (MIG1), migran laki-laki 1,18 kali lebih cenderung untuk bermigrasi jenis ini daripada perempuan. Migran berumur 15-50 tahun memiliki peluang bermigrasi 1,47 kali lebih besar daripada migran berumur 50 tahun ke atas. Begitu pula halnya dengan migran berumur kurang dari 15 tahun yang memiliki kecenderungan 1,19 kali. Kecenderungan migrasi jenis ketiga ini terlihat lebih besar pada individu yang menuju perdesaan. Hal ini tidak sesuai dengan pola migrasi pada umumnya yang menuju perkotaan. Akan tetapi sejalan dengan program transmigrasi yang umumnya menuju daerah perdesaan sebagai upaya untuk mengembangkan wilayah. Menurut pendidikan, kecenderungan individu bermigrasi terlihat lebih besar bagi mereka yang pendidikannya SMA ke bawah. Individu yang belum kawin dan bukan kepala rumah tangga juga menunjukkan kecenderungan bermigrasi yang lebih besar. Demikian pula halnya dengan migran yang berasal dari Pulau Jawa. Temuan juga menunjukkan bahwa individu yang bermigrasi cenderung bekerja di daerah tujuan.

Berdasarkan hasil estimasi multinomial logistik untuk masing-masing jenis migrasi di atas terdapat beberapa kesamaan karakteristik migran. Laki-laki memiliki risiko bermigrasi yang lebih tinggi dari perempuan. Temuan ini sejalan dengan hipotesis Ravenstein (Grigg, 1977) bahwa laki-laki cenderung melakukan migrasi dalam jarak yang lebih jauh dibandingkan dengan perempuan. Adalah kelompok umur 15 – 50 tahunlah yang memiliki risiko paling besar untuk bermigrasi. Hal ini tentu sangat masuk akal mengingat kelompok ini merupakan penduduk usia produktif yang kegiatan utamanya adalah

Tabel 6. Hasil Estimasi Multinomial Logit

Variabel Bebas		Migrasi Antarkab/kot Antarprovinsi			Migrasi Antarprovinsi Antarpulau		
		Koefisien	RRR		Koefisien	RRR	
Jenis Kelamin							
	Perempuan	-	-		-	-	
	Laki-laki	0,0693	1,0718	***	0,1691	1,1842	***
Umur saat migrasi							
	< 15 tahun	0,0656	1,0678	***	0,1763	1,1927	***
	15 - 50 tahun	0,1539	1,1663	***	0,3831	1,4668	***
	> 50 tahun	-	-		-	-	
Daerah tempat tinggal saat ini							
	Perkotaan	-	-		-	-	
	Perdesaan	-0,0603	0,9415	***	0,2638	1,3018	***
Pendidikan							
	<= SD	0,1550	1,1676	***	0,0689	1,0713	***
	SMP - SMA	0,0999	1,1051	***	0,0023	1,0023	
	> SMA	-	-		-	-	
Status bekerja							
	tidak bekerja	-	-		-	-	
	bekerja	0,1420	1,1526	***	0,1317	1,1407	***
Status kawin							
	tdk/blm kawin	0,1435	1,1543	***	0,2914	1,3383	***
	kawin	-	-		-	-	
Status Kepala Rumahtangga							
	KRT	-0,1202	0,8868	***	-0,1011	0,9038	***
	Bukan KRT	-	-		-	-	
Pulau Asal							
	Jawa	0,7479	2,1126	***	0,1111	1,1175	***
	Bukan Jawa	-	-		-	-	
Jumlah ART		-0,0033	0,9967	***	-0,0230	0,9772	***

RRR adalah *Relative Risk Ratio*. RRR menunjukkan besarnya risiko atau kecenderungan terjadinya variabel dependen untuk setiap kovariat. RRR yang lebih besar dari 1 menunjukkan hubungan positif antara variabel dependen dengan variabel bebas. Sementara RRR yang kurang dari 1 menunjukkan hubungan negatif antara variabel dependen dengan variabel bebas.

*** Signifikan pada $p < 0,001$

Sumber: Susenas 2012, diolah

bekerja. Migrasi adalah salah satu media untuk mendapatkan pekerjaan yang diharapkan.

Adalah kelompok berpendidikan rendah (SD ke bawah) yang memiliki risiko terbesar untuk bermigrasi. Kelompok ini adalah kelompok yang paling fleksibel untuk keluar masuk pasar kerja. Karena pengetahuan dan keterampilannya yang terbatas, kelompok ini mudah sekali keluar masuk pekerjaan yang sifatnya informal. Oleh karenanya, ketika keluar dari pekerjaan di suatu tempat, ia punya fleksibilitas tinggi untuk pindah ke tempat lain. Status bekerja setelah pindah tempat tinggal memiliki hubungan positif dengan migrasi. Hal ini mengindikasikan bahwa ketika individu memutuskan untuk bermigrasi, ada ekspektasi untuk mendapatkan pekerjaan di daerah tujuan yang kemungkinan terjadi karena terbatasnya kesempatan kerja di daerah asal. Keberhasilan migran memperoleh pekerjaan di daerah tujuan merupakan indikator bahwa ekspektasi ekonominya tercapai.

Individu yang tidak/belum kawin memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk bermigrasi. Bahkan risikonya untuk bermigrasi antarpulau lebih besar. Status kepala rumah tangga dan jumlah anggota rumah tangga berhubungan negatif dengan terjadinya migrasi. Ini berarti bahwa seorang kepala rumah tangga cenderung untuk tidak melakukan migrasi. Demikian pula halnya dengan semakin banyaknya jumlah anggota dalam rumah tangga, individu cenderung memilih untuk tidak bermigrasi. Individu yang berasal dari Pulau Jawa memiliki risiko dua kali lebih besar untuk melakukan migrasi antarprovinsi dibandingkan dengan yang bukan berasal dari Pulau Jawa. Risiko ini mengecil pada migrasi antarpulau.

IV. KESIMPULAN

Sejauh ini, program transmigrasi menjadi media pemerataan persebaran penduduk Indonesia

yang sesuai dengan daya dukung alam dan daya dukung lingkungan, serta menjamin terjadinya pembauran nilai budaya dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Program transmigrasi juga dimanfaatkan untuk mendorong pemerataan pembangunan daerah karena transmigrasi dapat berfungsi sebagai fasilitas penyedia, pengatur dan pengarah tenaga kerja produktif. Program transmigrasi juga bermanfaat untuk mengarahkan pengelolaan sumber daya wilayah-wilayah potensial yang kekurangan sumber daya manusia. Transmigrasi juga dapat berperan dalam menciptakan lapangan pekerjaan serta mengurangi angka kemiskinan.

Mengingat pentingnya peran dan tujuan transmigrasi, tulisan ini bermaksud untuk mengidentifikasi potensi transmigrasi di Indonesia dan karenanya, berusaha mengidentifikasi kelompok individu yang berpotensi melakukan transmigrasi. Karena data mutakhir yang berkaitan dengan transmigrasi sangat terbatas, maka kelompok yang berpotensi menjadi transmigran di-*proxy* melalui identifikasi terhadap kelompok yang memiliki kecenderungan bermigrasi, yaitu migrasi antarkabupaten/kota dalam satu provinsi, migrasi antarkabupaten/kota antarprovinsi, dan migrasi antarprovinsi antarpulau.

Temuan menunjukkan bahwa individu berjenis kelamin laki-laki, berusia produktif (15 – 50 tahun), berpendidikan rendah (SD ke bawah), tidak/belum kawin dan bukan kepala rumah tangga yang berasal dari Pulau Jawa memiliki kecenderungan yang tinggi untuk bekerja dan tinggal di daerah perkotaan melalui migrasi antarprovinsi. Sementara itu, laki-laki, berusia produktif (15 – 50 tahun), berpendidikan rendah (SD ke bawah), tidak/belum kawin dan bukan kepala rumah tangga yang berasal dari Pulau Jawa memiliki kecenderungan yang tinggi untuk bekerja dan tinggal di daerah perdesaan melalui migrasi antarpulau. Kelompok kedua inilah yang memiliki peluang dan berpotensi besar menjadi transmigran penduduk asal, mengingat sekitar 30 persen transmigran merupakan transmigran penduduk asal yang 85 persen berasal dari Pulau Jawa.

Dengan temuan ini, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi setidaknya dapat memiliki gambaran bahwa sasaran terbesar peserta transmigrasi sesuai dengan karakteristik di atas, meskipun tidak menutup kemungkinan adanya transmigran di luar kelompok di atas. Motif perbaikan kesejahteraan (ekonomi) menjadi tujuan

dari bermigrasi kelompok di atas. Diduga karena adanya keterbatasan kesempatan kerja dan kepemilikan asset menjadi pendorong mereka untuk berpeluang besar menjadi transmigran. Dalam pemanfaatan bonus demografi, kelompok usia 15 hingga 50 tahun di Indonesia yang berpendidikan rendah perlu mendapat peluang menjadi transmigran. Dengan identifikasi ini, diharapkan di masa depan, Pemerintah dapat fokus pada pengarahannya mobilitas penduduk melalui program transmigrasi untuk kelompok individu dengan karakteristik hasil temuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antarwati, Endang. (2012). *Tingkat Pengembalian Investasi Pendidikan Angkatan Kerja Perempuan di Indonesia: Upaya untuk Mengontrol Karakteristik Rumah Tangga*. Tesis. Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi. Depok: Universitas Indonesia.
- Arbex, Marcelo dan Freguglia, Ricardo. (n.d.). *Individual Characteristics and Probability of Migration of Brazilian Informal Workers*.
- Badan Pusat Statistik, (2014b). *Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Modul Sosial, Budaya dan Pendidikan*. Diakses pada 23 Mei 2014 dari <http://sirusa.bps.go.id/index.php?r=sd/detail&kd=2488&th=2012>
- Badan Pusat Statistik. (2011). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2012a). *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2012b). *Survei Sosial Ekonomi Nasional 2012*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2014a). *Sensus Penduduk 2010*. Diakses pada 11 Mei 2014 dari <http://sp2010.bps.go.id>
- Barker, Alexandra S. V. (2010). *Relative Socioeconomic Status and The Probability of Migration: A Study of The Effects of Relative Socioeconomic Status on The Decision to Migrate to The United States*. Tesis yang diajukan kepada Office of Graduate Studies. Boston: University of Massachusetts Boston.
- Borjas, George J. (1999). *Labor Economics*. New York: Cambridge University Press.

- Cameron A. C. and Triverdi, P. K. (2009). *Microeconomics Using Stata*. Texas: Stata Corp LP.
- Direktorat Jenderal P2KTrans. (2014). *Peta Sebaran Kawasan Transmigrasi Seluruh Indonesia*. Diakses pada 28 Agustus 2014 dari <http://p2ktrans.depnaakertrans.go.id/peta.html>
- Finnie, Ross. (2004). Who Moves? A Logit Model Analysis of Inter-Provincial Migration in Canada. *Applied Economics*. Vol 36. pp. 1759-1779.
- Grigg, D. B. (1977). E. G. Ravenstein and The Laws of Migration. *Journal of Historical Geography*. 3. 1 (1977). pp. 41-54.
- Hagen-Zanker, Jessica. (2008). Why Do People Migrate? A Review of The Theoretical Literature. *MPRA PaperNo. 28197*. Maastricht Graduate School of Governance, Maastricht University: The Netherland.
- Hamilton, Lawrence C. (2003). *Statistic with Stata. Updated for Version 7*. University of New Hampshire.
- Jacobs, Paul. (2012). The Role of Educational Attainment in Migration Probability and Destination Choice for the Metropolitan Rust Belt, 1970-2000. *All Graduate Theses and Dissertations*. Paper 1301. Utah State University.
- Kemenakertrans. 2014a (29 Agustus). *Perpindahan dan Penempatan Berdasarkan Daerah Asal dan Daerah Penempatan Tahun 2011*. Diakses pada 29 Agustus 2014 dari <http://www.depnaakertrans.go.id/pusdatin.html,6,505,ptrans>
- Kemenakertrans. 2014b (29 Agustus). *Perpindahan dan Penempatan Berdasarkan Daerah Asal dan Daerah Penempatan Tahun 2012*. Diakses pada 29 Agustus 2014 dari <http://www.depnaakertrans.go.id/pusdatin.html,6,517,ptrans>
- Kemenakertrans. 2014c (29 Agustus). *Perpindahan dan Penempatan Berdasarkan Daerah Asal dan Daerah Penempatan Tahun 2013*. Diakses pada 29 Agustus 2014 dari <http://www.depnaakertrans.go.id/pusdatin.html,6,529,ptrans>
- Kodrzycki, Yolanda K. (2001). Migration of Recent College Graduates: Evidence from The National Longitudinal Survey of Youth. *New England Economic Review* pp 13-34.
- Lee, Everett S. (1966). A Theory of Migration. *Demography*, Vol. 3, No. 1. pp. 47-57.
- Lucas, R. (1997). Internal Migration in Developing Countries. Chapter 13 in Rosenzweig M and O Stark (eds) *Handbook of Population and Family Economics* Vol. 1B, Elsevier Science B. V.
- Munir, Rozy. (2011). *Migrasi*. Dalam Adioetomo, Sri Moertiningsih. *Dasar-Dasar Demografi*. Edisi2. Jakarta: Salemba Empat.
- Safrida. (2008). *Dampak Kebijakan Migrasi Terhadap Pasar Kerja dan Perekonomian Indonesia*. Disertasi. Sekolah Pascasarjana. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Saleh, Harry H. (2005). *Transmigrasi: Antara Kebutuhan Masyarakat dan Kepentingan Pemerintah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sardjadidjaja, Rukman. (2005). *Transmigrasi: Pembauran dan Integrasi Nasional*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sjaastad, Larry A. (1962). Investment in Human Beings. *The Journal of Political Economy*, Vol. 70, No. 5, 80-93.
- StataCorp. (2009). *Stata: Release 11*. Statistical Software. College Station, Texas: StataCorp LP.
- Todaro, Michael P. (1976). Internal Migration in Developing Countries a Review of Theory, Evidence, Methodology and Research Priorities. Geneva: International Labour Office.
- Todaro, Michael P. (1998). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi 6. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian.
- Wooldridge, Jeffrey W. (2009). *Introductory Econometrics*. Canada: South-Western Cengage Learning.
- Zipf, George Kingsley. (1946). The P1 P2/D Hypothesis: On the Intercity Movement of Persons. *American Sociological Review*, vol. 11, Dec, pp. 677.